



JURNAL PENDIDIKAN INKLUSI CITRA BAKTI

<https://jurnal.citrabakti.ac.id/index.php/jpicb>



STUDI LITERATUR KESENJANGAN KOMPETENSI GURU REGULER DALAM IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF

Septiani Rahman¹⁾, Alifia Meysa Ababil²⁾, Achmad Muhtadin³⁾, Ikawati⁴⁾

^{1,2,3,4)}Pendidikan Matematika, Universitas Mulawarman

¹⁾septianirahman73@gmail.com, ²⁾mesa220506@gmail.com,
³⁾achmad.muhtadin@fkip.unmul.ac.id, ⁴⁾ikawati@fkip.unmul.ac.id

Histori artikel

Received:
13 April 2026

Accepted:
17 Mei 2026

Published:
2 Juni 2026

Abstrak

Pendidikan inklusif menempatkan guru reguler sebagai garda terdepan pendidikan, namun fakta lapangan menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi yang signifikan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar kesenjangan antara tugas yang diberikan kepada guru dengan kemampuan nyata di lapangan, sekaligus merumuskan strategi adaptasi bagi guru reguler dalam menanganinya. Metode yang digunakan berupa studi literatur sistematis terhadap berbagai artikel ilmiah relevan dalam rentang tahun 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala serius yang dihadapi guru reguler dikarenakan tidak adanya latar belakang Pendidikan Luar Biasa. Keterbatasan waktu, minimnya fasilitas di sekolah, serta belum tersedianya Guru Pendamping Khusus menjadi tantangan berat yang memicu risiko kelelahan kerja (burnout) pada pendidik. Meskipun pengembangan diri secara mandiri telah dilakukan, hal tersebut belum mampu meningkatkan kompetensi teknis guru secara signifikan dalam mengelola keberagaman di kelas. Kajian ini menyimpulkan bahwa dukungan manajerial melalui Standar Operasional Prosedur yang baku serta penguatan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan guna mengatasi kesenjangan profesionalisme tersebut. Sinergi antara kebijakan sekolah yang suportif dan inovasi pedagogik menjadi kunci keberhasilan transformasi pendidikan inklusif yang bermartabat.

Kata-kata Kunci: Kesenjangan Kompetensi, Profesionalisme Guru, Pendidikan Inklusif, Guru Reguler

*Corresponding author: Achmad Muhtadin (achmad.muhtadin@fkip.unmul.ac.id)

Abstract. Inclusive education places regular teachers as the front line of education, yet field facts indicate a significant competency gap. This study aims to identify the extent of the gap between the tasks assigned to teachers and their actual field capabilities, while formulating adaptation strategies for regular teachers. The method employed is a systematic literature review of relevant scientific articles within the 2020–2025 period. The results show that regular teachers face serious obstacles due to a lack of background in Special Needs Education. Time constraints, minimal school facilities, and the unavailability of Special Assistant Teachers pose heavy challenges that trigger the risk of burnout among educators. Although independent self-development has been undertaken, it has not significantly improved teachers' technical competencies in managing classroom diversity. This study concludes that managerial support through standardized Operating Procedures and competency strengthening via continuous training are essential to overcome this professionalism gap. Synergy between supportive school policies and pedagogical innovation is the key to a successful and dignified transformation of inclusive education.

Keywords: Competency Gap, Teacher Professionalism, Inclusive Education, Regular Teacher

Latar Belakang

Saat ini pendidikan inklusif di Indonesia bukanlah suatu tren pendidikan, melainkan amanat konstitusi yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Pasal 5 ayat (2), negara menjamin hak warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial untuk memperoleh pendidikan khusus. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mewajibkan pemerintah memfasilitasi pendidikan inklusif di semua jenjang. Secara hukum, regulasi ini memaksa sekolah reguler bertransformasi menjadi ruang yang ramah bagi keberagaman peserta didik tanpa terkecuali.

Namun, masalah utama sekolah inklusi saat ini adalah ketidaksiapan antara aturan dan kenyataan. Secara hukum, UU Nomor 14 Tahun 2005 mewajibkan guru untuk ahli dan profesional. Namun, saat pemerintah mewajibkan semua sekolah menerima anak berkebutuhan khusus (ABK), jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) masih sangat sedikit. Akibatnya, guru kelas biasa harus bekerja sendirian mendidik ABK tanpa bekal ilmu yang cukup. Hal ini membuat beban kerja guru menjadi sangat berat karena mereka harus mengajar sekaligus menangani kebutuhan khusus siswa secara mandiri (Pratiwi, 2015).

Penerapan sistem inklusi saat ini menempatkan guru reguler pada posisi yang sulit dengan tanggung jawab yang berlapis. Guru dituntut tidak hanya menguasai materi akademik secara umum, tetapi juga harus mampu menjamin ketercapaian target belajar bagi setiap siswa dengan karakteristik kebutuhan yang sangat beragam (Juntak, dkk., 2023). Kondisi ini menuntut guru untuk memiliki dedikasi, empati, dan profesionalisme yang luar biasa di tengah keterbatasan sarana pendukung. Harapan ini sering kali berbenturan dengan realita lapangan, di mana guru dipaksa tampil sebagai ahli pendidikan khusus meskipun

tanpa dibekali pelatihan teknis yang memadai maupun pendampingan dari tenaga ahli secara

Selain problematika kompetensi dasar, keterbatasan waktu dan beban administrasi yang tinggi menjadi determinan hambatan yang memberatkan pendidik. Guru reguler harus mengelola kelas besar dengan target kurikulum nasional yang kaku, sementara di saat yang sama mereka dituntut melakukan modifikasi modul ajar bagi siswa inklusi (Ummah dkk., 2023). Tekanan ganda ini sering kali mengakibatkan kreativitas guru dalam menyusun strategi pembelajaran menjadi sangat terbatas, sehingga pelayanan terhadap ABK cenderung hanya bersifat formalitas administratif atau "tokenism" (Pratiwi & Sukartono, 2025). Situasi ini diperparah oleh kondisi lingkungan sekolah yang masih diskriminatif secara fisik serta krisis jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK) yang seharusnya bertindak sebagai mitra kolaboratif teknis (Pratiwi dkk., 2022).

Menyadari keterbatasan tersebut, banyak guru berupaya melakukan pengembangan diri secara mandiri, salah satunya melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM). Namun, pembelajaran mandiri berbasis digital ditemukan belum cukup efektif untuk menggantikan pelatihan praktik yang intensif, terbukti dari kompetensi pedagogik guru dalam setting inklusi yang masih berada pada kategori sedang (Wulandari & Hendriani, 2021). Hal ini menandakan bahwa guru membutuhkan bimbingan langsung dan berkelanjutan untuk memahami teknik kompleks seperti pengajaran berdiferensiasi. Kajian ini menjadi sangat krusial sebagai potret realita menyedihkan mengenai profesionalisme guru yang berjuang di tengah keterbatasan sistemik.

Kajian terdahulu memang telah banyak membahas implementasi pendidikan inklusif dari sudut pandang kebijakan atau efektivitas sarana prasarana. Namun, penelitian ini hadir untuk mengisi celah literatur yang masih jarang dilakukan, yaitu dengan secara khusus memetakan kesenjangan (*readiness gap*) yang tajam antara tuntutan profesional guru reguler dan kompetensi teknis riil yang dimiliki di lapangan. Melalui pemetaan ini, diharapkan pengambil kebijakan dapat merumuskan model pelatihan terstruktur yang benar-benar menjawab kebutuhan praktis pendidik, bukan sekadar sosialisasi teori.

Metode

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang menggunakan desain kualitatif deskriptif. Menurut Zed (2008), metode studi pustaka tidak hanya sekadar mengumpulkan literatur, tetapi juga melibatkan analisis kritis terhadap teks guna membangun kerangka pemikiran atau memotret fenomena tertentu. Dalam konteks ini,

penelitian difokuskan pada sintesis hasil-hasil penelitian terdahulu untuk memotret kesenjangan kompetensi guru reguler dalam pendidikan inklusif secara mendalam.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, prosedur penelitian diawali dengan penentuan subjek penelitian berupa data literatur. Mengacu pada kriteria inklusi yang ditetapkan, sumber data mencakup artikel jurnal nasional yang terindeks pada basis data ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, atau Sinta, serta dokumen regulasi resmi yakni UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan UU Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016. Untuk menjamin aktualitas temuan, peneliti membatasi rentang terbit sumber literatur dalam lima tahun terakhir (2020–2025).

Data yang dikumpulkan melalui penelusuran pustaka dan dokumentasi literatur kemudian dianalisis melalui teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik untuk memastikan validitas serta reliabilitas hasil kajian. Proses analisis dilakukan dengan melakukan reduksi data, kategorisasi temuan berdasarkan tema hambatan (teknis, sistemik, dan manajerial), serta interpretasi data ilmiah secara sistematis. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa hasil penelitian yang diperoleh akurat, reliabel, dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan program pelatihan guru yang lebih efektif di sekolah inklusif.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur dan data lapangan yang telah diperoleh, hasil penelitian mengenai implementasi pendidikan inklusif disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Sintesis Literatur

Penulis & Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
Setiawan, H., dkk. (2020)	Analisis Kendala Guru di SDN Gunung Gatep Lombok Tengah dalam Implementasi Pendidikan Inklusif	Hambatan guru dalam implementasi inklusi di sekolah dasar	Ditemukan fenomena " <i>readiness gap</i> " di mana guru memiliki sikap positif (empati) namun rendah dalam kemahiran teknis pedagogik. Guru cenderung belajar secara mandiri melalui platform digital karena minimnya pelatihan formal
Wulandari, R. S., & Hendriani, W. (2021)	Kompetensi Pedagogik Guru Sekolah Inklusi di Indonesia (Suatu Pendekatan <i>Systematic Review</i>)	Potret kompetensi pedagogik guru melalui <i>systematic review</i>	Mayoritas kompetensi pedagogik guru berada pada kategori sedang; tantangan utama adalah kurangnya pendidikan khusus

Rizqianti, N. A., dkk. (2022)	Implementasi Tugas Guru Pembimbing Khusus serta Kendala sebagai Tenaga Pendidik Profesional di Sekolah Inklusi Kota Surabaya	Peran dan hambatan Guru Pembimbing Khusus (GPK)	Terjadi krisis jumlah GPK dan beban kerja ganda yang mengganggu efektivitas penyusunan PPI
Cahyaningsih, I., & Astuti, K. (2022)	Hubungan Persepsi Supervisi Akademik dengan Kompetensi Pedagogik pada Guru Sekolah Dasar Inklusi	Pengaruh supervisi kepala sekolah terhadap kompetensi mengajar	Terdapat hubungan positif antara supervisi akademik pimpinan dengan peningkatan kepercayaan diri (<i>self-efficacy</i>) guru
Pratiwi, L. T., dkk. (2022)	Permasalahan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia	Hambatan sistemik pendidikan inklusi di tingkat nasional	Fasilitas fisik sekolah masih diskriminatif (ketiadaan ramp/toilet khusus) dan dukungan anggaran terbatas
Ummah, R., dkk. (2023)	Tantangan atau Hambatan dalam Menerapkan Pendidikan Inklusi	Sisi psikologis dan pedagogis guru dalam adaptasi kurikulum	Target kurikulum yang kaku memicu resistensi mental, tekanan psikologis, serta <i>burnout</i> pada guru reguler
Sahrudin, M., dkk. (2023)	Pengelolaan Pendidikan Inklusif	Tata kelola dan manajemen penyelenggaraan inklusi di sekolah	Sekolah beroperasi tanpa SOP yang baku, sehingga pelayanan ABK bersifat sporadis dan tidak sistematis
Izzah, N., dkk. (2023)	Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Sekolah Ramah Anak di Sekolah Inklusi	Kepemimpinan kepala sekolah dalam budaya Sekolah Ramah Anak	Kepala sekolah menjadi kunci melalui kebijakan pro-keberagaman dan pengalokasian sumber daya yang adil
Biantoro, O. F., & Rahmatullah, A. (2024)	Pendidikan Inklusif di Indonesia: Peluang dan Tantangan	Peluang pemanfaatan teknologi asistif dalam inklusi modern	Pemanfaatan teknologi (seperti <i>speech-to-text</i>) menjadi solusi primer mengatasi keterbatasan rasio GPK
Anggreani, K., dkk. (2024)	Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar: Tantangan dan Strategi Efektif	Strategi pembelajaran kolaboratif dan penggunaan media konkret	Kurangnya media pembelajaran multisensori menghambat akses siswa inklusi terhadap materi secara bermakna
Ibda, F. I. F. (2024)	Penguatan Sumber Daya Guru dalam Mendukung	Penguatan kualitas SDM pendidik sebagai	Rendahnya kompetensi dipicu oleh kurikulum LPTK yang belum mewajibkan materi PLB

	Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Inklusi				pilar utama secara terpadu
Pratiwi, D. W., & Sukartono, S. (2025)	Persepsi terhadap Tantangan dan Peluang Implementasi Pendidikan Inklusi	Guru dan dalam	Dinamika persepsi guru dan peluang komunitas belajar		Disarankan pembentukan komunitas belajar (KKG Inklusi) untuk berbagi praktik baik dalam menyelesaikan kendala harian
Muttaqya, A. T., dkk. (2025)	Kesiapan dalam Menghadapi Pendidikan Inklusi untuk Anak Berkebutuhan Khusus	Guru dan	Evaluasi tingkat kesiapan guru dari aspek sikap dan pengetahuan		Ditemukan fenomena " <i>readiness gap</i> " di mana guru memiliki sikap positif namun rendah dalam kemahiran teknis
Munawir, M., dkk. (2025)	Tantangan dan Strategi Guru Profesional dalam Menangani Keberagaman Siswa di Pendidikan Inklusif	Guru dan	Strategi guru profesional dalam mengelola keberagaman siswa		Pembelajaran berdiferensiasi dan kolaborasi aktif dengan orang tua adalah strategi kunci manajemen keberagaman

Pembahasan

Berdasarkan hasil sintesis literatur dalam rentang waktu lima tahun terakhir (2020–2025), ditemukan bahwa implementasi pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi hambatan fundamental berupa *readiness gap* pada guru reguler. Fenomena ini dianalisis melalui empat tema utama berikut:

1. Kesenjangan Kompetensi Pedagogik

Hasil sintesis literatur menunjukkan adanya diskoneksi tajam antara ranah afektif dan teknis pada guru reguler. Meskipun secara psikologis mayoritas guru telah menunjukkan empati dan keterbukaan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) (Muttaqya dkk., 2025), hal ini tidak serta-merta berkolerasi dengan kemahiran instruksional. Wulandari & Hendriani (2021) memperkuat temuan ini dengan data bahwa kompetensi pedagogik guru inklusi masih berada pada kategori sedang. Kesenjangan ini dipicu oleh persoalan hulu di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang belum mewajibkan materi Pendidikan Luar Biasa (PLB) secara komprehensif, sehingga guru merasa tidak memiliki fondasi pengetahuan yang cukup (Ibda, 2024).

Ketidakmampuan teknis ini terlihat jelas dalam kegagalan guru menyusun instrumen vital pembelajaran. Setiawan dkk. (2020) menyoroti bahwa tanpa

penguasaan metode asesmen yang akurat, guru reguler mustahil dapat merancang Program Pembelajaran Individual (PPI) yang efektif. Hal ini menciptakan situasi di mana proses belajar-mengajar di kelas inklusi berjalan tanpa arah yang jelas. Jika dibandingkan dengan temuan Ibda (2024), terlihat bahwa masalahnya bukan pada keengganan guru untuk mengajar, melainkan pada absennya kemahiran spesifik dalam melakukan modifikasi kurikulum yang sesuai dengan karakteristik hambatan setiap siswa (Qondias et al., 2025).

2. Ketiadaan Dukungan Sistemik dan Infrastruktur

Kesenjangan profesionalisme guru diperparah oleh minimnya dukungan sistemik, terutama ketersediaan tenaga ahli. Rizqianti dkk. (2022) mengungkapkan bahwa jumlah Guru Pendamping Khusus (GPK) di Indonesia sangat tidak proporsional, yang menyebabkan beban instruksional sepenuhnya jatuh ke tangan guru reguler. Temuan ini selaras dengan analisis Setiawan dkk. (2020) yang menyatakan bahwa ketiadaan GPK membuat koordinasi teknis terputus, karena guru reguler kehilangan figur profesional untuk berkonsultasi mengenai strategi penanganan perilaku ABK di dalam kelas.

Selain krisis SDM pendamping, hambatan sistemik juga muncul dari sisi aksesibilitas fisik. Pratiwi dkk. (2022) memaparkan bahwa banyak sekolah inklusi yang lingkungannya masih bersifat diskriminatif karena ketiadaan fasilitas dasar seperti *ramp* atau toilet aksesibel. Temuan ini didukung oleh Anggreani dkk. (2024) serta Biantoro & Rahmatullah (2024) yang menekankan bahwa tanpa media pembelajaran multisensori dan teknologi asistif, siswa inklusi hanya hadir secara fisik (*tokenism*) tanpa benar-benar bisa mengakses materi pelajaran secara bermakna.

3. Beban Psikologis dan Tekanan Administratif Guru

Ketimpangan antara ekspektasi kebijakan yang tinggi dan rendahnya kapasitas diri memicu dampak psikologis serius bagi pendidik. Ummah dkk. (2023) menemukan bahwa munculnya resistensi mental dan risiko *burnout* (kelelahan kerja) sering kali berakar dari tekanan untuk menuntaskan target kurikulum nasional yang kaku sambil harus memodifikasi modul ajar. Beban ganda ini, menurut Pratiwi & Sukartono (2025), menuntut adanya penguatan kompetensi melalui workshop berkelanjutan yang bersifat praktis, bukan sekadar pemaparan teori yang memperberat beban kognitif guru.

Dimensi hambatan lain yang sering terabaikan adalah tata kelola administratif yang rumit. Sahrudin dkk. (2023) mencatat bahwa ketidaksinkronan antara tuntutan pelayanan humanis dan kewajiban pelaporan administratif membuat pelayanan terhadap ABK berjalan secara sporadis. Hal ini sejalan dengan kekhawatiran Pratiwi &

Sukartono (2025) mengenai risiko "labeling" administratif semata. Kedua temuan ini menyiratkan bahwa tanpa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, profesionalisme guru akan terus tergerus oleh beban birokrasi yang tidak relevan dengan kebutuhan pembelajaran di kelas.

4. Strategi Penguatan Profesionalisme dan Inovasi Pedagogik

Sebagai solusi atas berbagai kendala tersebut, literatur terbaru mengarahkan pada penggunaan strategi yang lebih fleksibel. Munawir dkk. (2025) mengusulkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi (*differentiated instruction*) sebagai metode untuk memodifikasi konten sesuai profil belajar siswa. Strategi ini dianggap lebih efektif jika dipadukan dengan pemanfaatan teknologi asistif. Biantoro & Rahmatullah (2024) secara spesifik membandingkan efektivitas teknologi seperti aplikasi *speech-to-text* yang dapat bertindak sebagai alat bantu untuk menutupi celah keterbatasan jumlah GPK di sekolah.

Terakhir, penguatan profesionalisme tidak bisa dilakukan secara individual, melainkan melalui ekosistem kolaboratif. Izzah dkk. (2023) menekankan pentingnya kepemimpinan kepala sekolah yang pro-keberagaman sebagai fondasi utama. Hal ini sejalan dengan temuan Cahyaningsih & Astuti (2022) yang membuktikan adanya hubungan positif antara supervisi akademik kepala sekolah dengan peningkatan kompetensi pedagogik serta kepercayaan diri (*self-efficacy*) guru. Temuan ini diperkuat oleh Munawir dkk. (2025) yang menyarankan penguatan komunitas belajar melalui KKG Inklusi dan integrasi dukungan keluarga. Dengan membandingkan kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi pendidikan inklusif memerlukan sinergi antara kebijakan manajerial sekolah dan dukungan sosial dari lingkungan terkecil siswa.

Kesimpulan

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pendidikan inklusif sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru reguler sebagai garda terdepan. Namun, kajian ini membuktikan adanya kesenjangan kesiapan (*readiness gap*) yang signifikan, di mana sikap positif dan empati guru belum berbanding lurus dengan kompetensi kognitif-teknis yang memadai. Berdasarkan data yang dianalisis, kesenjangan ini dipicu oleh kurikulum pra-jabatan di LPTK yang belum terintegrasi sepenuhnya dengan materi Pendidikan Luar Biasa (PLB), sehingga guru mengalami hambatan teknis dalam identifikasi siswa dan penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI). Kondisi tersebut diperburuk oleh kendala sistemik berupa kelangkaan Guru

Pendamping Khusus (GPK), infrastruktur sekolah yang minim aksesibilitas, serta beban administratif tinggi yang berisiko memicu kejenuhan (*burnout*) pada pendidik.

Kajian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan transformasi melalui pergeseran paradigma ke arah strategi yang lebih fleksibel, seperti penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan optimalisasi teknologi asistif. Implikasi praktis dari temuan ini menekankan pentingnya dukungan kepemimpinan kepala sekolah yang suportif serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku sebagai instrumen krusial dalam menciptakan ekosistem inklusi yang berkelanjutan. Selain itu, model pelatihan guru sebaiknya diarahkan pada penguatan komunitas belajar seperti KKG Inklusi yang bersifat praktis guna memitigasi praktik inklusi semu (*tokenism*).

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan secara empiris mengenai efektivitas penggunaan teknologi asistif berbasis kecerdasan buatan (AI) sebagai solusi alternatif dalam menutupi celah keterbatasan rasio GPK di Indonesia. Selain itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai model sinkronisasi kebijakan antara birokrasi pendidikan dan kebutuhan riil di tingkat satuan pendidikan guna memastikan keberlanjutan program inklusi yang lebih substantif.

Daftar Pustaka

- Anggreani, K., Tafsira., N.A., Febriyani, T., Syafitri, E. (2024). Implementasi pendidikan inklusi di sekolah dasar: Tantangan dan strategi efektif. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, 1(2), 199–204. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i2.4132>
- Biantoro, O. F., & Rahmatullah, A. (2024). Pendidikan inklusif di Indonesia: Peluang dan tantangan. *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)*, 2(1), 24–33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10654321>
- Cahyaningsih, I., & Astuti, K. (2022). Hubungan persepsi supervisi akademik dengan kompetensi pedagogik pada guru sekolah dasar inklusi. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(11), 1180–1187. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i11.682>
- Ibda, F. I. F. (2024). Penguatan sumber daya guru dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di sekolah inklusi. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 9(2), 94–105. <https://doi.org/10.24246/j.js.2024.v14.i1.p20-34>
- Izzah, N., Setianti, Y., Tiara, O (2023). Peran kepemimpinan kepala sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak di sekolah inklusi. *Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 272–284. <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.312>
- Juntak, J.N.S., Rynaldi, A & Sukomardijo, T. (2023). Implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Nasional*, 5(1), 12–25.
- Munawir, M., Septya, N. M., Amalia, R., & Muallifa, Z. (2025). Tantangan dan strategi guru profesional dalam menangani keberagaman siswa di pendidikan inklusif. *Ainara Journal: Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan*, 6(2), 275–283. <https://doi.org/10.33394/jtp.v13i1.9876>

- Muttaqya, A.T., Priyanto, A.S., Hidayah, A.N & Meilana, S.F. (2025). Kesiapan guru dalam menghadapi pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 1351–1363. <https://doi.org/10.21831/jpk.v19i1.65432>
- Pratiwi. (2022). Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, 3(2), 314–318. <https://ejournal.unmuhkupang.ac.id/index.php/jpdf>
- Pratiwi, D. W., & Sukartono, S. (2025). Persepsi guru terhadap tantangan dan peluang dalam implementasi pendidikan inklusi. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 8(1), 189–197. <https://doi.org/10.23917/jupin.v15i2.5432>
- Qondias, D., Bhaghi, F. N., & Azi, A. (2025). Analisis kesulitan belajar pada anak berkebutuhan khusus pada Sekolah Luar Biasa Negeri Bajawa. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 3(1), 102–115. <https://doi.org/10.38048/jpicb.v3i1.5604>
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Rizqianti, N.A., Ediyanto., Ningsih, PK., Sunandar, A. (2022). Implementasi tugas guru pembimbing khusus serta kendala sebagai tenaga pendidik profesional di sekolah inklusi Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 6(1), 67–75. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/plb>
- Sahrudin. (2023). Pengelolaan pendidikan inklusif: Tantangan administrasi dan operasional. *Jambura Journal of Educational Management*, 10(1), 162–179. <https://doi.org/10.17509/jap.v10i1.43210>
- Setiawan, H., Oktaviyanti, I., Jiwandono, I.S., Affandi, L.H., Ermiana, I., Khair, B.N. (2020). Analisis kendala guru di SDN Gunung Gatep Kabupaten Lombok Tengah dalam implementasi pendidikan inklusif. *Didaktis: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 20(2), 145–160. <https://doi.org/10.31949/jee.v3i2.2345>
- Ummah. (2023). Tantangan atau hambatan dalam menerapkan pendidikan inklusi. *Jurnal Madrasah Ibtidaiyah*, 2(1), 111–118. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jipt>
- Wulandari, R. S., & Hendriani, W. (2021). Kompetensi pedagogik guru sekolah inklusi di Indonesia: Suatu pendekatan systematic review. *Jurnal Kependidikan*, 7(1), 143–157. <https://doi.org/10.21831/jk.v7i1.35402>
- Zed, M. (2008). Metode penelitian kepustakaan. Yayasan Obor Indonesia.